

ABSTRAK

Pada tahun 2014 Rusia mengenakan kebijakan larangan impor babi hidup, daging babi dan produk babi lainnya dari seluruh negara di Uni Eropa karena adanya penyakit *African Swine Fever* (ASF) di negara Lituania. Kebijakan larangan impor ini dianggap sebagai *European Union-wide ban* oleh Uni Eropa. Uni Eropa menggugat kebijakan tersebut kepada DSB WTO dengan alasan kebijakan tersebut melanggar beberapa pasal dalam Perjanjian SPS, antara lain Pasal 2.3, 5.5, 6.1 dan 6.2 Perjanjian SPS. Berdasarkan gugatan Uni Eropa, Panel menyatakan terdapat beberapa pasal telah dilanggar Rusia dan terdapat beberapa pasal yang dianggap tidak dilanggar oleh Rusia, yaitu Pasal 5.5 dan 6.2.

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penulisan yang mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum positif. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti berbagai data baik dari bahan primer maupun sekunder dan memberi pendapat yang bersifat praktis yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Rusia telah melanggar Pasal 2.3 dan 6.1 Perjanjian SPS sesuai dengan putusan DSB. Di sisi lain, Penulis tidak sependapat dengan putusan Panel yang menyatakan bahwa Rusia tidak melanggar Pasal 5.5 dan 6.2 Perjanjian SPS. Tulisan ini merekomendasikan beberapa hal, yaitu kepada Rusia bahwa pentingnya bukti ilmiah dan penilaian risiko dalam menerapkan Kebijakan SPS, kepada Uni Eropa untuk tidak menyetujui suatu sertifikat veteriner negara importir apabila standar impor yang diberlakukan di dalam sertifikat tersebut tidak sesuai dengan standar internasional dan kepada para pihak untuk meningkatkan upaya non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa.

Kata Kunci : Kebijakan larangan impor, Babi, Rusia, SPS Agreement

ABSTRACT

In 2014 Russia adopted a policy prohibiting imports of live pigs, pork and other pork products from all countries in the European Union due to the presence of African Swine Fever (ASF) in Lithuania. This import ban policy was considered a European Union-wide tire by the European Union. The European Union sued the policy to the WTO DSB on the grounds that the policy violated several articles in the SPS Agreement, including Articles 2.3, 5.5, 6.1 and 6.2 of the SPS Agreement. Based on the European Union lawsuit, the Panel stated that there were several articles that Russia had violated and there were several articles that were considered not violated by Russia, namely Articles 5.5 and 6.2.

This paper was prepared using the normative juridical method, which is writing based on the application of legal principles and principles to positive legal norms or regulations. This paper aims to examine various data both primary and secondary material and provide practical opinions that can be scientifically justified.

The results showed that Russian policy violated Articles 2.3 and 6.1 of the SPS Agreement in accordance with the DSB decision. On the other hand, the author disagrees with the Panel's decision which states that Russia does not violate Articles 5.5 and 6.2 of the SPS Agreement. This paper recommends several things, namely to Russia that the importance of scientific evidence and risk assessment in implementing the SPS Policy, to the European Union not to approve an importer's country veterinary certificate if the import standards imposed in the certificate are not in accordance with international standards and to the parties to increase non-litigation efforts in resolving disputes.

Keywords: Import ban policy, Pig, Russia, SPS Agreement